AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

The Influence of Transparency and Accountability on the Financial Management of the Minahasa Regency Regional Government

Winda Gultom [1*], Florence O. Moroki [2], Pebisitona Mesajaya Purba [3]
[1-3] Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Indonesia

**Penulis Korespondensi: windagultom783@gmail.com*

Abstract. *This study aims to determine the effect of transparency and accountability on the financial management of the Minahasa Regency Government. A quantitative approach with an associative research design was employed. Primary data were collected through questionnaires distributed to 38 respondents working in the finance departments of Regional Apparatus Organizations (OPD) in Minahasa Regency. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results indicate that transparency has a positive and significant effect on regional financial management. Accountability also has a positive and significant effect on regional financial management. These findings indicate that higher levels of transparency and accountability are associated with better financial management in the regional government. In practical terms, regional government agencies (Organisasi Perangkat Daerah) can use these findings as input to improve the presentation of budgetary information, clarify responsibilities regarding financial reporting, and strengthen the documentation of budget utilization. Such efforts can assist stakeholders in understanding how the budget is planned and used. This study concludes that enhanced transparency and accountability are linked to improvements in the financial management of the Minahasa Regency Government.*

Keyword: *Accountability; Financial Management; Local Government; Multiple Linear Regression; Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 38 responden yang merupakan pegawai bidang keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Minahasa. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, semakin baik pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, Organisasi Perangkat Daerah dapat menggunakan temuan ini sebagai masukan untuk memperbaiki penyajian informasi anggaran, memperjelas tanggung jawab dalam pelaporan keuangan, dan memperkuat dokumentasi penggunaan anggaran. Upaya tersebut dapat membantu pihak yang berkepentingan memahami bagaimana anggaran direncanakan dan digunakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan perbaikan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pemerintah Daerah; Pengelolaan Keuangan; Regresi Linear Berganda; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan luas dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mahmudi, 2021; Suryani et al., 2026). Sesuai

Naskah Masuk: 18 Agustus 2026; Revisi: 28 September 2026; Diterima: 12 November 2026; Terbit: 26 November 2026

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel (PP No. 12 Tahun 2019).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Keladu et al., 2026; Masitha & Mulyadi, 2023). Penerapan kedua prinsip ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat serta kualitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Kondisi di Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2023 masih menemukan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, serta pengelolaan aset yang belum tertib secara administratif (BPK RI, 2024). Kasus penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2022 di Dinas PPKB Kabupaten Minahasa menunjukkan adanya laporan pertanggungjawaban yang tidak sah dan menimbulkan kerugian negara (Kejari Minahasa, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara optimal.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa menunjukkan fluktuasi dan belum mencerminkan kekuatan basis penerimaan daerah (Redaksi SULUT NEWS, 2022; Redaksi, 2024). Struktur belanja daerah juga menunjukkan ketidakseimbangan, di mana belanja pegawai masih mendominasi dibandingkan belanja modal sehingga berpotensi menghambat pembangunan (Redaksi, 2024). Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Humendru et al., 2026; Pemkab Minahasa, 2024).

Permasalahan tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dalam hubungan tersebut menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas sebagai mekanisme pengendalian (Jensen & Meckling, 1976). Tanpa penerapan kedua prinsip tersebut, pengelolaan keuangan daerah berisiko tidak efisien dan tidak tepat sasaran (Mbipi et al., 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasugian et al. (2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif, sementara akuntabilitas menunjukkan

pengaruh yang berbeda terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ria Herlina dan Taufik (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks Pemerintah Kabupaten Minahasa (Arum et al., 2026; Bobii & Waspodo, 2026).

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji secara langsung pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Minahasa, termasuk temuan audit, struktur anggaran, serta kasus penyalahgunaan dana publik. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran nyata mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

2. KAJIAN TEORITIS

Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*, di mana masyarakat sebagai *principal* memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola keuangan daerah dan menyelenggarakan pelayanan publik. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini dapat dilihat dari hubungan atau kontrak antara *agent* dan *principal*, dimana agen memiliki keunggulan karena memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal. Adapun salah satu informasi yang dimiliki oleh *agent* adalah berupa laporan keuangan. Pemerintah sebagai pihak *agent* yang memiliki tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan, serta mempublikasikannya untuk memudahkan akses bagi masyarakat sebagai pihak *principal* yang memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pemerintahan. Baik *agent* maupun *principal* berusaha memanfaatkan informasi yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan masing-masing (Listyawati et al., 2020). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik keagenan, di mana transparansi mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta kesesuaian dengan kepentingan masyarakat (Leatemia & Usmany, 2021).

Transparansi

Transparansi keuangan daerah adalah keterbukaan informasi kepada publik mengenai proses dan hasil pengelolaan anggaran, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Masitha, R., & Mulyadi, 2023). Transparansi yang terbuka meningkatkan kepercayaan publik dan pengawasan masyarakat, sementara akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah (Herlinanur, H et al., 2025). Dalam konteks ini, transparansi tidak hanya mencakup penyediaan informasi keuangan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan serangkaian tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*action*), penatausahaan, pertanggung jawaban serta pengawasan (Sumampouw O, 2023). Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan (Pinontoan et al., 2023). Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, sesuai dengan peraturan, serta berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan

Dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah), Pengelola keuangan daerah ialah pejabat yang mengelola keuangan daerah yang secara keseluruhan melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang optimal dapat meningkatkan

kinerja pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Hasugian et al., 2021).

Hipotesis

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang menjamin keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD secara lebih jelas. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, di mana transparansi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah (*agent*) dengan masyarakat (*principal*). Penelitian Yasid et al., (2025) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Penerapan transparansi melalui keterbukaan informasi keuangan dan pelaporan yang jelas, terbukti mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di suatu instansi.

H1: Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, serta pengelolaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Pemerintahan yang akuntabel akan mendorong penggunaan anggaran secara tepat sasaran, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan (Mahsun, M., & Edowai, 2021). Dalam perspektif *Agency Theory*, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah agency problem yang muncul akibat adanya asimetri informasi antara pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*principal*). Penelitian Yassir et al., (2022) yang menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasugian et al., (2021) akuntabilitas keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Hutauruk et al., (2023) penelitian kuantitatif mendefinisikan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada popuplasi atau sampel tertentu. Penelitian kuantitatif untuk menguji teori secara objektif dengan mengaji hubungan antar variabel yang diukur melalui dara numerik dan dianalisis menggunakan prosedur statistic

(Creswell, J. W., & Creswell, 2022). Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen yaitu yaitu Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) dan variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan (Y). Pada penelitian ini data yang digunakan ialah data primer. Sugiyono (2021) mengatakan Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/ subjek yang memiliki kuantitas serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti buat dipelajari dan setelah itu diambil kesimpulannya. Adapun populasi pada penelitian ini adalah pegawai yang bekerja dibidang keuangan pada OPD Kabupaten Minahasa berjumlah 38 pegawai dan Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Nonprobality Sampling* (Sampel Jenuh), yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi relative kecil. Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah semua populasi pegawai yang menjadi sasaran penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai terendah (Minimum), tertinggi (Maximim), rata- rata (Mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2) dan Pengelolaan Keuangan (Y). Mengenai hasil Uji Statistik Deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif.

Descriptive Statistics					
	N	**Minimum**	**Maximum**	**Mean**	**Std. Deviation**
Transparansi	38	15,00	25,00	19,7895	2,96062
Akuntabilitas	38	9,00	15,00	12,7368	1,82600
Pengelolaan Keuangan	38	21,00	35,00	28,1579	4,14941
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Hasil output spss 26

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel 1, berikut *output* yang dihasilkan

1. Variabel Transparansi (X1), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 15, nilai maximum sebesar 25, nilai mean sebesar 19,7895 dan standar deviasi variabel X1 sebesar 2,96062.
2. Variabel Akuntabilitas (X2), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 9, nilai maximum sebesar 15, nilai mean sebesar 12,7368 dan standar deviasi variabel X2 sebesar 1,82600.

3. Variabel Pengelolaan Keuangan (Y), dari data tersebut bisa di deskripsikan bahwa nilai minimum 21, nilai maximum sebesar 35, nilai mean sebesar 28,1579 dan standar deviasi variabel Y sebesar 4,14941.

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji apakah pernyataan dalam penelitian ini valid atau tidaknya. Jika r hitung > r tabel maka data tersebut dinyatakan valid. Uji ini digunakan untuk membandingkan tingkat signifikan data yang diolah. Nilai r tabel ditentukan pada signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 38, df = n – 2 = 38 – 2 = 36, maka r tabel = 0,329. Setiap item dikatakan valid apabila r hitung > 0,329. Dalam pengujian validitas ini peneliti menggunakan SPSS 26 dan hasil yang didapatkan masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas (X1), (X2) dan (Y).

Variabel	Pernyataan	Nilai R Hitung	Nilai R Tabel	Keterangan
Transparansi	X1.1	0.959	0.312	VALID
	X1.2	0.985	0.312	VALID
	X1.3	0.958	0.312	VALID
	X1.4	0.977	0.312	VALID
	X1.5	0.958	0.312	VALID
Akuntabilitas	X2.1	0.870	0.312	VALID
	X2.2	0.961	0.312	VALID
	X2.3	0.946	0.312	VALID
Pengelolaan Keuangan	Y.1	0.911	0.312	VALID
	Y.2	0.903	0.312	VALID
	Y.3	0.961	0.312	VALID
	Y.4	0.964	0.312	VALID
	Y.5	0.923	0.312	VALID
	Y.6	0.953	0.312	VALID
	Y.7	0.970	0.312	VALID

Sumber: Hasil output spss 26

Berdasarkan tabel 2. dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada tiap-tiap variabel yaitu: Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Pengelolaan Keuangan (Y). Memiliki r-Hitung > r-Tabel, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Item pernyataan pada tiap-tiap variabel dinyatakan Valid, (*data terlampir*).

Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas yaitu jika koefisien *Cronbach Alpha* > 0.60 maka pernyataan dinyatakan andal atau reliabel. Sebaliknya jika koefisien *Cronbach Alpha* < 0.60, maka pertanyaan tidak andal atau reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas.

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Batas	Keputusan
1	Transparansi	0.982	> 0.60	Reliabel
2	Akuntabilitas	0.915	> 0.60	Reliabel
3	Pengelolaan Keuangan	0.978	> 0.60	Reliabel

Sumber: Hasil *output* spss 26

Berdasarkan uji diatas dapat diliat ahwa nilai *Cronbach Alpha* di hasilkan masing-masing > 0.60. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah reliabel (*data terlampir*).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel independen dan variabel dependen sudah berdistribusi normal atau tidak yang kemudian jika data tersebut sudah terdistribusi normal maka akan dilanjutkan dengan uji regresi linear. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS 26 dengan tabel *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam perhitungan p-value atau nilai probabilitas pada uji normalitas, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yakni pendekatan *Asymptotic*, *Exact*, dan *Monte Carlo*. Secara otomatis, SPSS menghitung nilai *P-Value* menggunakan pendekatan *Asymptotic*. Apabila asumsi normalitas data tidak terpenuhi dalam pendekatan *Asymptotic*, uji normalitas bisa menggunakan pendekatan *Exact* (Meutia et al., 2022).

Tabel 4. Hasil Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,74646683
Most Extreme Differences	Absolute	0,181
	Positive	0,176
	Negative	-0,181
Test Statistic		0,181
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003[c]
Exact Sig. (2-tailed)		0,146
Point Probability		0,000

Sumber: Hasil output spss 26

Berdasarkan tabel diatas maka hasil pengujian normalitas *Kolmogrov Smirnov* menggunakan pendekatan *Exact*, dijelaskan bahwa nilai *Exact Sig*. (2 *tailed*) sebesar 0.146 > 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan data ini layak dipergunakan untuk penelitian sehingga memenuhi uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pegujian multikolinieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai tolerance serta nilai VIF. Jika VIF < 10 dan tolerance > 0,1 artinya tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas.

Model		Coefficients[a]						
				Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0,962	0,920		-1,046	0,303		
	Transparansi	0,930	0,070	0,663	13,249	0,000	0,369	2,710
	Akuntabilitas	0,842	0,114	0,371	7,402	0,000	0,369	2,710

Sumber: Hasil output spss 26

Berdasarkan pada tabel 5. dapat dilihat nilai tolerance pada variabel Transparansi 0,369 dan Variabel Akuntabilitas 0,369 dimana nilai tersebut > 0,1 dan untuk nilai VIF pada variabel Transparansi 2,710 dan pada variabel Akuntabilitas 2,710 dimana nilai tersebut < 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi Transparansi dan Akuntabilitas tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengujian heterokedasitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas peneliti menggunakan Metode uji Spearman"s rho. Uji heteroskedastisitas Spearman"s rho mengkorelasikan nilai residual hasil regresi dengan masing-masing variabel independen (Massora, 2021). Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedasitas dengan Spearman"s rho yaitu :

1. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Correlations					
			X1	X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	.789**	-0,048
		Sig. (2-tailed)		0,000	0,773
		N	38	38	38
	X2	Correlation Coefficient	.789**	1,000	-0,157
		Sig. (2-tailed)	0,000		0,345
		N	38	38	38
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-0,048	-0,157	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,773	0,345	
		N	38	38	38

Sumber: Hasil output spss 26

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.6, diperoleh nilai signifikansi variabel Transparansi sebesar 0,773 > 0,05 dan Akuntabilitas sebesar 0,345 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang melibatkan variabel Transparansi dan Akuntabilitas tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Model pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Pengelolaan Keuangan (Y).

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Coefficients[a]						
Model				**Standardized Coefficients Beta**	**t**	**Sig.**
1	(Constant)	-0,962	0,920		-1,046	0,303
	Transparansi	0,930	0,070	0,663	13,249	0,000
	Akuntabilitas	0,842	0,114	0,371	7,402	0,000

Sumber: Hasil output spss 26

Berdasarkan tabel 7, dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -0{,}962 + 0{,}930 + 0{,}842$$

Dari persamaan berikut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta diperoleh sebesar -0,962 maka dapat diartikan jika Variabel Independen bernilai 0 (konstan) maka variabel bernilai -0,962 .
2. Nilai Koefisien regresi Variabel X1 bernilai positif (+) sebesar 0,930, maka dapat diartikan jika variabel X1 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat, begitupun sebaliknya.
3. Nilai Koefisien regresi Variabel X2 bernilai positif (+) sebesar 0,842, maka dapat diartikan jika variabel X2 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat, begitupun sebaliknya.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa baik variabel X menjelaskan variabel Y dengan nilai 0-1. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Model Summary				
Model	**R**	**R Square**	**Adjusted R Square**	**Std. Error of the Estimate**
1	.984[a]	0,968	0,966	0,76750

Sumber: Hasil output spss 26

Berdasarkan table 8. diketahui bahwa nilai R-*Square* sebesar 0,968. Hal ini berarti bahwa 96,8% variabel Y ditentukan oleh Variabel X1 dan X2. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Pengujian Hipotesis pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan. Penelitian ini digunakan untuk menjawab hipotesis apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan.

Tabel 9. Hasil Uji t.

Coefficients[a]						
Model				**Standardized Coefficients Beta**	**t**	**Sig.**
1	(Constant)	-0,962	0,920		-1,046	0,303
	Transparansi	0,930	0,070	0,663	13,249	0,000
	Akuntabilitas	0,842	0,114	0,371	7,402	0,000

Sumber: Hasil output spss 26

1. Variabel Transparansi (X1) memperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, Variabel Transparansi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Pengelolaan Keuangan (Y).
2. Variabel Akuntabilitas (X2) memperoleh nilai signifikan 0,000 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa H2 ditetima, Variabel Akuntabilitas (X2) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Pengelolaan Keuangan (Y).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara positif memengaruhi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Transparansi yang diterapkan melalui keterbukaan informasi keuangan mampu meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah, sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, akuntabilitas juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan secara jelas

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu hanya menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas serta dilakukan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, atau pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas objek penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR REFERENSI

Arum, B. P., et al. (2026). Implementasi *cash management system* Bank Jateng pada bendahara pengeluaran kecamatan tahun 2025: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 6*(2). https://doi.org/10.51903/jupea.v6i2.6795

Bobii, K., & Waspodo, L. (2026). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan dana desa. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 5*(2). https://doi.org/10.30640/inisiatif.v5i2.6163

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.).

Hasugian, F. T. S. P., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *value for money*, kejujuran, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Studi kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *6*(2), 175–185. https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997

Herlinanur, H., Rahmawati, R., & Syarifuddin, S. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.

Humendru, F. S. A., et al. (2026). Peran *fintech payment* dalam memperkuat arus kas dan akuntabilitas keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 15*(1). https://doi.org/10.56444/ewr47m79

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Keladu, Y., et al. (2026). Analisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka: Tinjauan teori keadilan. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 4*(3). https://doi.org/10.59031/jkpim.v4i3.842

Leatemia, S. Y. P. U. (2021). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *9*(2), 119–130. https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5248

Mahmudi. (2021). *Akuntansi sektor publik*.

Mahsun, M., & Edowai, Z. (2021). Kinerja sektor publik dalam perspektif akuntansi. *Jurnal Administrasi Publik*.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*.

Masitha, R., & Mulyadi, M. (2023). Transparansi keuangan daerah dan dampaknya pada kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.

Mbipi, S. D., Assih, P., Sumtaky, M., Terusan, J., & Dieng, R. (2020). Pengelolaan keuangan daerah dan *good governance* terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. *3*(2), 152–158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503

Meutia, D., Thamrin, H., Lubis, M. A., & Utara, U. S. (2022). Pengaruh bisnis online terhadap kesejahteraan mahasiswa pelaku usaha bisnis online di Kota Medan. *1*(4), 727–736. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.374

Minahasa, K. N. (2024). *Kejari Minahasa tahap 2 tersangka baru Tipikor Dana BOKB T.A 2022*.

Minahasa, P. K. (2024). *Rencana strategis (Renstra) Kabupaten Minahasa tahun 2024–2026*.

Olviane Sumampouw, M. M. (2023). Pengaruh dukungan atasan, peran konflik afektif dan akuntabilitas terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7422

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Pinontoan, T. S., Kantohe, M., & Frandy, E. F. (2023). Pengaruh efektivitas fungsi pengendalian internal Kabupaten Minahasa Utara. *4*(1), 187–195. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4251

Salihi, S., Hutauruk, G., & Hasnarika, L. (2023). Pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*.

Sumampouw, O. (2023). Pengaruh dukungan atasan, peran konflik afektif dan akuntabilitas terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7422

Suryani, et al. (2026). Pengaruh penerapan *e-government*, transparansi dan maturitas sistem pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (JISE)*, *4*(2). https://doi.org/10.59024/jise.v4i2.1593

Yasid, A. (2025). Jurnal E-Bussiness di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros: The influence of transparency and accountability on financial management at the Department of Population and Civil Registration of Maros Regency. *5*(2), 152–161. https://doi.org/10.59903/ebussiness.v5i2.244

Yassir, Y., Mursalim, M., & A. J. (2022). Pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan.